

ANALISIS BIAYA TRANSAKSI PADA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI (NPK DAN UREA) DI KECAMATAN JATINANGOR

**Muhammad Ridwan Alawi¹, Antonius Souw², Arneta Fergiane Puteri³, Dinia
Athaya Salsabila⁴, Aurelia Claressa Maritza⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran
Email: muhammad21005@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Biaya transaksi yang tinggi merupakan suatu ciri-ciri dari *imperfect market*, yang mana biaya transaksi dapat ditekan namun tidak dapat dihilangkan. Biaya transaksi pada distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi akan berpengaruh terhadap pendapatan usaha pedagang pupuk bersubsidi karena terjadinya pengurangan surplus yang cukup besar dari pedagang ke pihak lain. Oleh sebab itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis saluran distribusi pupuk bersubsidi, pendapatan pedagang, dan biaya transaksi pada distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat dengan metode analisis pendapatan dan analisis rasio biaya transaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis pendapatan pedagang, dapat dikatakan bahwa usaha pupuk toko WG Tani dan Tani Berkah Jaya masih mengalami keuntungan. Sementara analisis biaya transaksi menunjukkan biaya terbesar yang harus ditanggung oleh pedagang adalah biaya pelaksanaan dalam proses penjualan dan distribusi pupuk bersubsidi, serta biaya koordinasi.

Kata kunci: Biaya Transaksi, Pupuk bersubsidi, Pendapatan, Distribusi.

Abstract

High transaction costs are a characteristic of imperfect markets, where transaction costs can be suppressed but cannot be eliminated. The transaction costs on the distribution and sale of subsidized fertilizers will have an impact on the business income of the subsidised fertilizer trader due to the significant reduction of surpluses from the trader to the other party. Therefore, the study aims to analyze the distribution channels, the traders' revenue, and the transaction cost on distribution and sales of subsidised fertilizer in Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java. The results of this study show that based on the analysis of traders' income, it can be said that the business of WG Tani and Tani Berkah Jaya's fertilizer stores is still profitable. Whereas the transaction cost analysis shows that the largest costs to be borne by traders are implementation costs in the process of sale and distribution of subsidized fertilizers, as well as coordination costs.

Keywords: Transaction Costs, Subsidized Fertilizer, Income, Distribution.

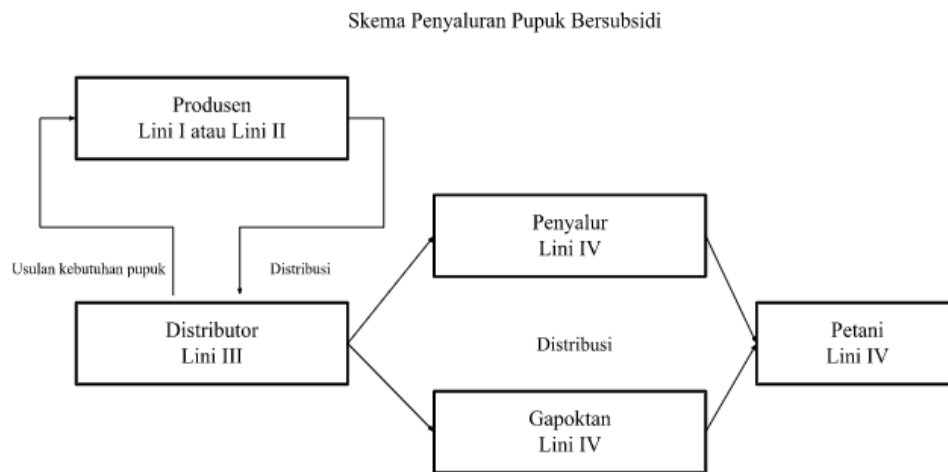
Pendahuluan

Sektor pertanian memainkan peran yang cukup krusial dalam ekonomi Indonesia. Setiap kenaikan sebesar 1 juta dalam nilai pertanian meningkatkan total GDP sebesar 3,096264 juta menurut (Isbah & Iyan, 2016). Hidayah et al., (2022) mengemukakan bahwa pertanian penting bagi ekonomi negara berkembang maupun maju. Maka dari itu, berinvestasi pada sektor ini seharusnya menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan output pertanian dan memperkuat posisinya sebagai pasar ekonomi yang sedang berkembang. Meskipun memiliki lahan subur yang luas, para petani menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat produktivitas yang rendah karena akses terbatas terhadap input, teknologi, dan sebagainya. Input pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pertumbuhan produktivitas didefinisikan sebagai peningkatan output di luar peningkatan penggunaan input terkait (atau penurunan kuantitas input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output tersebut) (Boult & Chancellor, 2020). Dalam konteks ini, input pertanian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Dengan memanfaatkan input pertanian secara optimal, petani dapat mengoptimalkan produksi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan pendapatan. Dalam era pertanian yang terus berkembang, input pertanian yang tepat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pertanian, serta merupakan salah satu bagian dari sarana produksi pertanian yang sangat menentukan tingkat produktivitas pertanian. Kebutuhan pupuk petani secara nasional berkisar antara 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton setiap tahunnya. Namun, anggaran negara hanya mencukupi 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton pupuk atau setara dengan 25 triliun rupiah (Sari et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk di pasar baik dari segi kuantitas, kualitas, keterjangkauan harga, dan distribusi yang merata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 yang mengatur alokasi dan harga eceran maksimum pupuk bersubsidi. Pupuk memiliki peran krusial dalam pertumbuhan tanaman dan perbaikan lahan, oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara cermat dan bijaksana. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, mulai dari penentuan kebutuhan pupuk, bahan baku produksi, proses produksi, serta dukungan lembaga terkait seperti permodalan dan peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Selain itu, distribusi pupuk juga memiliki peran penting dalam menyediakan pupuk dari produsen kepada konsumen. Pengelolaan distribusi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk memastikan ketepatan dalam hal jumlah, waktu, dan harga bagi konsumen. Hal ini akan mendukung kegiatan sektor pertanian di tingkat nasional.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian, pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan penugasan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yaitu PT Pupuk Indonesia melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Melalui surat keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, distribusi pupuk di Indonesia sekarang menggunakan sistem rayonisasi sehingga kecukupan pasokan pupuk di Indonesia terjamin dan tersebar merata. Pendistribusian

dan pengadaan pupuk melibatkan beberapa pelaku dan kegiatan dalam menyalurkan pupuk dari produsen (Lini I dan Lini II) distributor (Lini III) dan pengecer atau GAPOKTAN (Lini IV). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Gambar 1
Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi

Efisiensi distribusi pupuk dapat dipengaruhi oleh pendek atau panjangnya jalur mata rantai distribusi. Semakin pendek mata rantai distribusi dan semakin kecil margin keuntungan yang ditetapkan maka kegiatan distribusi tersebut semakin efisien (Tjahjono & Ardi, 2008). Alur distribusi yang memadai dan optimal dapat menjamin peningkatan kualitas dan ketersediaan pupuk serta mempengaruhi harga pupuk yang dapat dijangkau oleh para petani maupun konsumen. Faktanya, distribusi pupuk dapat berdampak pada kekurangan pupuk bersubsidi, karena keefektifannya sangat diperhatikan. Dalam kasus yang ada di lapangan, kios pengecer belum melakukan kegiatan distribusi pupuk dengan efektif. Berdasarkan penelitian (Kautsar et al., 2020), hal ini disebabkan karena para petani masih membeli pupuk bersubsidi di kios tidak resmi yang sudah ditetapkan wilayah kerjanya. Seharusnya petani membeli pupuk bersubsidi pada masing-masing kelompok taninya atau pada kios resmi (Lini IV) sesuai pada ketentuan alur penyaluran pupuk subsidi dan wilayah kerjanya. Penyebab petani membeli pupuk di kios pengecer karena jarak antara kios resmi dengan tempat tinggal petani relatif jauh sehingga lebih memakan waktu dibandingkan membeli di kios resmi. Selain itu, lambatnya ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi menyebabkan petani lebih memilih membeli di kios pengecer untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Perlu diketahui bahwa setiap pedagang pengecer pupuk terkadang menghadapi beberapa permasalahan biaya transaksi dan modal yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang berbeda dan saluran distribusi yang kurang efektif.

Untuk mengidentifikasi besarnya biaya transaksi yang ditanggung oleh pedagang pengecer pupuk, dapat dilihat bagaimana alur distribusi dan kegiatan penjualan yang dijalankan oleh pedagang pengecer tersebut. Adapun pendekatan biaya transaksi yang digunakan adalah biaya yang ditanggung oleh pedagang pengecer tetapi tidak diperhitungkan ke dalam biaya operasional. Dalam kegiatan ekonomi, biaya transaksi memang sulit dihindari, tetapi

keberadaannya bisa ditekan hingga mencapai tingkat yang paling efisien. Jika tidak, biaya transaksi yang tinggi akan mengurangi penerimaan pedagang pengecer pupuk, sehingga berdampak pada perolehan keuntungan pedagang pengencer pupuk dalam jangka panjang. Apabila hal ini terjadi pada pedagang pengecer yang kondisi ekonominya belum stabil dan mengalami masalah dalam hal permodalan, tentu akan menyebabkan kesulitan keuangan. Akibatnya pupuk di tingkat distributor tidak dapat ditebus oleh pedagang pengecer dan hanya mampu menjual pupuk kepada petani dalam jumlah yang terbatas, atau bahkan tidak menjual sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui bagaimana alur distribusi dan penjualan yang dilakukan pedagang pengecer pupuk bersubsidi, biaya transaksi apa saja yang terjadi dalam proses tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang pengecer pupuk bersubsidi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2023 di wilayah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan responden pedagang pengecer pupuk. Adapun jenis data primer yang dikumpulkan meliputi alur distribusi pupuk bersubsidi, pendapatan, dan biaya transaksi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data kios resmi pengecer pupuk resmi bersubsidi dan alur distribusi pupuk bersubsidi di lokasi penelitian.

Responden pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan responden sebanyak dua orang pemilik kios yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Karakteristik responden dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis pendapatan usaha digunakan untuk menganalisis pendapatan dan biaya transaksi.

Untuk mengetahui pendapatan usaha maka dilakukan analisis pendapatan sesuai petunjuk (Soekartawi, 2002). Secara sistematis, analisis pendapatan (π) sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC \quad (1)$$

Kemudian adanya biaya transaksi, maka secara sistematis analisis pendapatan (π) sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$
$$\pi = P \cdot Q - ((FC + VC) + TrC) \quad (2)$$

Keterangan:

- π = Pendapatan Usaha (Rp)
- TR = Total Penerimaan/ *Total Revenue* (Rp)
- TC = Total Biaya/ *Total Cost* (Rp)
- TrC = Biaya Transaksi (Rp)
- P = Harga (Rp)
- Q = Jumlah

Kriteria R/C:

$R/C > 1$ artinya usaha yang dilakukan menguntungkan.

$R/C < 1$ artinya usaha yang dilakukan mengalami kerugian.

Sedangkan untuk menghitung total ada biaya transaksi (τC), maka digunakan persamaan berikut ini:

$$\tau C = \sum z_i \quad (3)$$

Rasio masing-masing komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi (Z) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{z_i}{\tau C} \quad (4)$$

$$\sum z_i = 1 \quad (5)$$

Keterangan:

τC = Total Biaya Transaksi (Rp)

z_i = Komponen Biaya Transaksi (Rp)

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah melakukan pengalokasian pupuk bersubsidi sebesar 7,85 juta ton yang terdiri atas 3,21 juta ton pupuk NPK dan 4,64 juta ton pupuk urea (Saputra et al., 2024). Pupuk bersubsidi ini khusus disalurkan kepada petani yang berhak sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tata cara alokasi pupuk bersubsidi di sektor pertanian (Karundeng, 2022). Persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi antara lain petani terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), tergabung ke dalam kelompok tani, menggarap lahan paling sedikit 2 hektar dan menggunakan kartu tani (untuk wilayah tertentu). Pupuk bersubsidi difokuskan kepada 9 komoditas strategis yaitu bawang putih, padi, cabai, jagung, kedelai, bawang merah, kakao, tebu, dan kopi. Petani dapat menebus pupuk bersubsidi tersebut pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.

Secara umum karakteristik pedagang pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Jatinangor diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, lama pengalaman berdagang, lama pendidikan formal, luas lahan, dan status penguasaan lahan usaha (Tabel 1). Karakteristik pedagang ini penting untuk dipelajari karena dapat mempengaruhi perilaku ekonomi rumah tangga pedagang seperti pengambilan keputusan penyediaan stok pupuk, mengatur *cashflow* penjualan, ataupun keputusan alokasi penggunaan tenaga kerja, tata letak barang, dan lainnya untuk memperoleh pendapatan yang paling tinggi. Pendapatan yang diperoleh nantinya akan dialokasikan untuk modal usaha serta konsumsi rumah tangga pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa semua pedagang pengecer pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai usia produktif dengan tingkat pendidikan formal sebagian masih cukup rendah dan sebagian menengah. Adapun untuk pengalaman berdagang, kedua responden terlihat sudah cukup lama dalam menekuni kegiatan berdagang pupuk bersubsidi. Pengalaman pedagang ini tentu akan mempengaruhi kepiawaian mereka dalam berdagang, di mana semakin lama pengalaman berdagang maka akan semakin baik dalam mengelola kegiatan berdagangnya. Dalam status penguasaan lahan, satu responden berdagang di lahan milik sendiri sedangkan yang lainnya masih menyewa dengan harga pasaran. Selanjutnya untuk luas lahan

yang dimiliki oleh kedua responden sebenarnya relatif kecil tetapi penggunaannya masih belum maksimum.

Tabel 1
Karakteristik Pedagang Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jatinangor Tahun 2023

No.	Karakteristik Pedagang	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis kelamin:		
	Laki-laki	2	100
	Perempuan	-	0
2.	Umur:		
	25-45 tahun	1	50
	46-65 tahun	1	50
3.	Pengalaman berdagang:		
	15-25 tahun	1	50
	26-35 tahun	1	50
4.	Lama pendidikan formal:		
	1-9 tahun	1	50
	10-12 tahun	0	0
	>12 tahun	1	50
5.	Status penguasaan lahan:		
	Milik sendiri	1	50
	Sewa	1	50

Sumber: Data Primer diolah, 2023

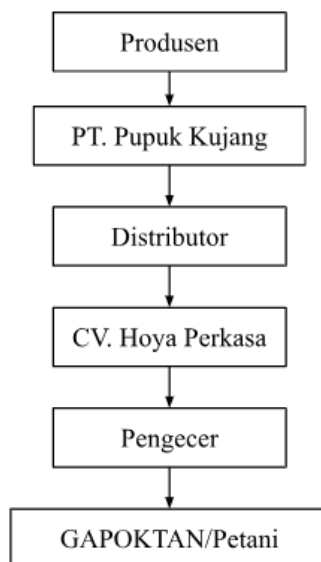
Analisis Saluran Distribusi Pupuk Bersubsidi

Saluran distribusi adalah jalur yang harus ditempuh oleh aliran barang dari produsen ke agen atau perantara atau pedagang besar hingga mencapai pengguna, dalam hal ini konsumen. Saluran distribusi sangatlah penting dalam operasional perusahaan. (Lestari et al., 2022). Perusahaan yang menyalurkan pupuk bersubsidi ke Kabupaten Sumedang yaitu PT. Pupuk Kujang yang memproduksi pupuk urea, NPK, dan bahan industri kimia lainnya. Proses distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu produsen, pemerintah, distributor, pengecer, dan petani. Produsen bertugas untuk menyiapkan pupuk, sedangkan pemerintah menyiapkan alokasi. Distributor kemudian menyalurkan pupuk bersubsidi ke pengecer dan pengecer langsung menjual ke petani. Sistem ini memungkinkan adanya pengawasan yang ketat dalam distribusi pupuk bersubsidi ke petani. Pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Pupuk Kujang dikirim ke setiap provinsi melalui gudang distributor yang berada di tingkat kabupaten. Kemudian, pupuk tersebut dibagikan ke pengecer yang bertanggung jawab di kecamatan.

Di Kabupaten Sumedang, distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh 5 distributor resmi, yaitu PT. Angkasa Raya Christa, PT. Fajar Perkasa Utama, PT. Mega Eltra, PT. Petrosida, dan CV. Sinar Jaya. Setiap distributor resmi bertanggung jawab di wilayah tanggung jawabnya masing-masing. Di Kecamatan Jatinangor, distributor resmi yang bertanggung jawab adalah CV. Hoya

Perkasa. Alur distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat pengecer (Tingkat Kecamatan) melibatkan beberapa pihak, termasuk pengecer dan distributor. Dalam penelitian ini, terdapat dua pengecer resmi yang menjadi informan, yaitu Bapak H. Ocen yang beralamat di Desa Jatimukti (WG Tani) dan Bapak Atik Setiadi yang beralamat di Desa Mekargalih (Tani Berkah Jaya). Kedua pengecer ini melakukan penebusan pupuk bersubsidi masing-masing di pihak distributor yang sama yaitu di CV. Hoya Perkasa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah pupuk yang dibeli untuk wilayah tanggung jawab WG Tani adalah sebesar 30-40 ton/bulan dengan proporsi 70% urea dan 30% NPK untuk 7 desa yang meliputi Hegarmanah, Cilayung, Cileles, Cisempur, Jatiroke, Jatimukti, dan Cintamulya. Sementara itu, Tani Berkah Jaya hanya mampu membeli sebanyak 10 ton/2 bulan untuk 5 desa, yaitu Sayang, Cibeusi, Cipacing, Mekargalih, dan Cintamulya. Namun, perlu dicatat bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang tersedia di WG Tani lebih banyak dibandingkan dengan Tani Berkah Jaya karena wilayah tanggung jawab WG Tani memiliki luas lahan tanam yang lebih luas daripada wilayah yang ditanggung jawabi oleh Tani Berkah Jaya. Oleh karena itu, meskipun jumlah pupuk bersubsidi yang tersedia di WG Tani lebih banyak, hal ini masih dianggap sebagai keputusan yang adil dan selaras dengan kebutuhan wilayah masing-masing.



Sumber: Data Primer diolah, 2023

Gambar 2

Skema Aliran Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jatinangor

Pada umumnya, sistem penyaluran pupuk dari pihak pengecer kepada petani dilakukan melalui gudang pengecer. Setelah pupuk tiba di gudang, petani dapat membeli pupuk yang telah tersedia. Penyaluran pupuk bersubsidi yang dibagikan kepada petani harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan 6 prinsip tepat tersebut belum tercapai. Dalam penelitian ini ditemukan salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman pupuk dari distributor ke gudang pengecer. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh, terutama pada kawasan Jatinangor yang berada di ujung wilayah dan posisinya paling

jauh dari pusat kabupaten Sumedang. Kendala ini semakin terasa ketika memasuki musim hujan, di mana banyak petani yang mulai menanam dan membutuhkan pupuk tetapi pupuk belum tersedia di toko. Selain itu, terdapat masalah yang sering ditemukan yaitu penggunaan kartu tani yang tidak efektif, hal ini disebabkan karena realisasi dan penggunaan kartu tani masih minim, sehingga kuota pupuk yang seharusnya dibeli oleh petani itu tidak habis, seperti yang dikemukakan (Gunawan & Pasaribu, 2020) yang menunjukkan faktor kuat persepsi petani pada kartu tani yaitu program tersebut tidak tersampaikan dengan baik dan terdapat kesulitan dalam penggunaan kartu ini. Akibatnya pedagang pun tidak mungkin menebus kuota selanjutnya dari distributor jika masih tersisa banyak di toko. Hal ini sejalan dengan penelitian (Gunawan & Pasaribu, 2020) Beberapa hambatan yang muncul dalam pemanfaatan kartu tani di antaranya petani menghadapi kesulitan dalam menggunakan fasilitas ini karena harus menyetor uang deposit terlebih dahulu ke bank sebelum bisa memanfaatkan kartu tani dan merasa penggunaan kartu tani lebih kompleks sehingga lebih memilih cara manual.

Permasalahan terkait distribusi pupuk bersubsidi tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan peran lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian (Jamil, 2022), bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pupuk bersubsidi dengan merancang peraturan dan program. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang dapat menjaga harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan. Selain itu, pemerintah juga terlibat dalam pengawasan, penilaian, dan sertifikasi atas pelaksanaan program subsidi pupuk. Memastikan prinsip ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi dan mengawasi penyalurannya di lapangan merupakan tanggung jawab Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Kinerja KP3 sejauh ini tidak terlalu baik karena kelambanan KP3 dalam memenuhi permintaan petani, seperti distribusi pupuk yang tidak merata yang mengakibatkan kelangkaan di suatu lokasi. Penyebab KP3 tidak berjalan dengan baik antara lain karena kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan masalah keuangan.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja KP3 dengan pengaktifan kembali KP3 melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai payung hukum KP3. Selain itu, produsen dan distributor pupuk bersubsidi di Indonesia juga dapat mendukung KP3 dalam upaya pengawasan. Diharapkan produsen akan meningkatkan pengelolaan dan penyaluran distribusi pupuk bersubsidi di tingkat kios melalui anak perusahaannya. Sebagai badan pengatur, pemerintah harus menyediakan panduan teknis dan standar yang tepat untuk pengawasan lapangan. Selanjutnya, pendanaan untuk prosedur distribusi pupuk bersubsidi harus ditambahkan oleh pemerintah, terutama untuk badan-badan pengawas. Lembaga lain yang relevan dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) serta Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Kedua organisasi ini berfungsi sebagai platform untuk mendukung tujuan petani, melindungi hak-hak mereka, dan membantu petani-khususnya dalam hal kemampuan mereka untuk mengakses dukungan dan fasilitas pemerintah untuk industri pertanian.

Analisis Struktur Pendapatan Pedagang Pengecer Pupuk Bersubsidi

Analisis pendapatan usaha pada pedagang pengecer pupuk bersubsidi merupakan indikator untuk mengetahui usaha tersebut mengalami rugi atau untung. Perhitungan pendapatan usaha pada pedagang pengecer pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Uraian Tempat, Biaya Total, Penerimaan Total, Pendapatan Usaha, dan R/C Rasio Pedagang Pengecer Pupuk Bersubsidi

Uraian Tempat	Biaya total (TC)/bulan	Penerimaan total (TR)/bulan	Pendapatan usaha/bulan	R/C
WG Tani	Rp100.000.000	Rp112.500.000	Rp12.500.000	1,125
Tani Berkah Jaya	Rp12.500.000	Rp13.000.000	Rp500.000	1,04

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Biaya total merupakan biaya yang mengacu pada jumlah total semua biaya yang terlibat dalam menjalankan suatu usaha, termasuk semua biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan dalam melakukan suatu usaha. Penerimaan adalah nilai yang diperoleh dari hasil melakukan kegiatan usaha. Pendapatan usaha merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Tabel 2 juga menunjukkan pendapatan pada pedagang pengecer pupuk bersubsidi di toko WG Tani sebesar Rp12.500.000/bulan sedangkan pada toko Tani berkah jaya sebesar Rp500.000/bulan. Untuk mengetahui untung atau tidaknya usaha pupuk maka perlu dilakukannya analisis R/C. Berdasarkan hasil perolehan perhitungan R/C dari setiap tempat pengecer pupuk bersubsidi, toko WG tani memperoleh R/C sebesar 1,125 dan toko tani berkah jaya memperoleh R/C sebesar 1,04. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha pupuk toko WG tani dan tani berkah jaya mengalami keuntungan ($R/C > 1$). Analisis R/C pada pedagang pengecer pupuk bersubsidi, seperti yang diuraikan sebelumnya, memberikan wawasan yang berharga tentang kesehatan finansial usaha mereka. Studi sebelumnya oleh (Foeh et al., 2022) telah menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara R/C dan profitabilitas dalam konteks usaha pertanian. Melalui penelitian ini, mereka menyoroti bahwa R/C yang lebih tinggi cenderung berkorelasi positif dengan tingkat keuntungan yang lebih besar.

Analisis Struktur Biaya Transaksi Pedagang Pengecer Pupuk Bersubsidi

Menurut (Sultan & Rachmina, 2016), biaya transaksi merujuk pada pengeluaran di luar harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Munculnya biaya transaksi disebabkan oleh keterbatasan informasi dan kendala dalam mengakses informasi. Hal ini menyebabkan pelaku ekonomi sering menghadapi situasi di mana informasi yang mereka miliki tidak lengkap atau tidak pasti. Biaya transaksi meliputi pengeluaran tambahan yang melebihi biaya produksi suatu produk atau layanan. Keberadaan biaya transaksi ini dapat meningkatkan total pengeluaran yang dikeluarkan dalam suatu usaha.

Dalam Tabel 3, terlihat bahwa rata-rata komponen biaya transaksi pada usaha pupuk memiliki perbandingan yang menarik. Komponen dengan persentase paling tinggi adalah biaya pelaksanaan sebesar 39,56%. Biaya pelaksanaan ini mencakup biaya bongkar muat barang dari distributor ke pedagang. Aktivitas bongkar muat dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, dan frekuensinya bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen toko. Misalnya, pada WG Tani, aktivitas ini dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam sebulan, sedangkan pada Tani Berkah Jaya hanya dilakukan 1 kali dalam 2 bulan. Sementara itu, dalam penelitian Sultan & Rachmina (2016), persentase tertinggi komponen biaya transaksi adalah biaya negosiasi dengan nilai sebesar 60,30% dari total biaya transaksi. Di sisi lain, biaya monitoring

merupakan komponen dengan persentase terkecil, yaitu 1,15%. Biaya ini dikeluarkan oleh pedagang untuk mencetak dan menduplikat dokumen serta membeli materai yang diperlukan dalam laporan bulanan pengecer ke Tim Verifikasi dan Validasi di tingkat Kecamatan. Meskipun jumlahnya kecil, kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan ketaatan pedagang terhadap regulasi dan meminimalkan penyalahgunaan atau kecurangan dalam distribusi pupuk.

Tabel 3
Komponen Biaya Transaksi dalam Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi

No.	Komponen Biaya Transaksi	Jumlah (Rp)			Persentase (%)		
		WG Tani	Tani Berkah Jaya	Rata-Rata	WG Tani	Tani Berkah Jaya	Rata-Rata
1.	Biaya Informasi	30.000	230.000	130.000	2,29	47,92	25,11
2.	Biaya Koordinasi	250.000	200.000	225.000	19,08	41,66	30,38
3.	Biaya Pelaksanaan	900.000	50.000	475.000	68,70	10,42	39,56
4.	Biaya Negosiasi	100.000	-	50.000	7,63	-	3,83
5.	Biaya Monitoring	30.000	-	15.000	2,29	-	1,15
Total Biaya Transaksi		1.310.000	480.000	895.000	100	100	100

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Perbedaan dalam persentase biaya pelaksanaan dan biaya monitoring dapat disebabkan oleh perbedaan dalam skala dan kompleksitas aktivitas yang terkait. Biaya pelaksanaan melibatkan aktivitas bongkar muat yang dilakukan secara rutin dan frekuensinya dapat bervariasi antara toko pupuk. Sementara itu, biaya monitoring melibatkan aktivitas yang lebih terfokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan pelaporan bulanan.

Tabel 4
Rasio Biaya Transaksi dengan Penerimaan pada Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi

No.	Komponen	Jumlah (Rp)		Rata-rata
		WG Tani	Tani Berkah Jaya	
1.	Biaya Transaksi	1.310.000	480.000	895.000
2.	Penerimaan	112.500.000	13.000.000	62.750.000
3.	Rasio Biaya Transaksi dengan Penerimaan	0,012	0,37	0,014

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa untuk rasio biaya transaksi usaha pupuk bersubsidi terhadap penerimaan yang diperoleh toko WG Tani adalah sebesar 0,012. Artinya, setiap penerimaan Rp100.000, toko akan mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp1.200. Selain itu, dapat dilihat juga pada tabel bahwa untuk rasio biaya transaksi usaha pupuk bersubsidi terhadap penerimaan yang diperoleh toko Tani Berkah Jaya adalah sebesar 0,37. Artinya, setiap penerimaan Rp100.000, toko akan mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp37.000. Rasio ini menunjukkan bahwa biaya transaksi pada usaha penjualan pupuk bersubsidi, mempengaruhi penerimaan yang diterima oleh kedua toko, di mana dengan adanya biaya transaksi mengurangi jumlah penerimaan yang seharusnya diterima oleh kedua toko.

Tabel 5
Rasio Biaya Transaksi dengan Total Biaya pada Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi

No.	Komponen	Jumlah (Rp)		
		WG Tani	Tani Berkah Jaya	Rata-Rata
1.	Biaya Transaksi	1.310.000	480.000	895.000
2.	Biaya Operasional	100.000.000	12.500.000	56.250.000
3.	Total Biaya	101.310.000	12.980.000	57.145.000
4.	Rasio Biaya Transaksi dengan Total Biaya	0,013	0,037	0,016

Sumber: Data diolah, 2023

Untuk rasio biaya transaksi dengan biaya total pada usaha pupuk bersubsidi dapat ditinjau bahwa biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional toko WG Tani dan toko Tani Berkah Jaya secara berturut-turut sebesar 0,013 dan 0,037. Besarnya nilai biaya transaksi yang dikeluarkan oleh toko dalam kegiatan operasional menunjukkan bahwa semakin besar nilai rasio biaya transaksi terhadap biaya total, maka proses operasional usaha pupuk bersubsidi dapat dinyatakan tidak efisien.

Berdasarkan perbandingan antara biaya transaksi dengan penerimaan dan total biaya dalam usaha penjualan pupuk bersubsidi, dapat disimpulkan bahwa biaya transaksi memiliki dampak peningkatan terhadap total biaya yang harus ditanggung. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pedagang, sangat penting untuk mengurangi biaya transaksi seefisien mungkin.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan pedagang pengecer pupuk bersubsidi dipengaruhi oleh modal, luas lahan dan pengalaman berdagang. Distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat pengecer di Kecamatan Jatinangor melibatkan beberapa pihak, yaitu pengecer (Toko WG Tani dan Tani Berkah Jaya) dan distributor (CV. Hoya Perkasa). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti penggunaan Kartu Tani yang tidak efektif dan keterlambatan pengiriman pupuk dari distributor ke gudang pengecer. Kondisi tersebut terjadi akibat kurang efektifnya kelembagaan seperti pemerintah dan KP3 dalam melakukan pengawasan. Adapun pendapatan pedagang pengecer pupuk bersubsidi pada toko WG Tani

sebesar Rp12.500.000/bulan dengan R/C sebesar 1,125 sedangkan pendapatan yang diperoleh toko Tani berkah Jaya sebesar Rp500.000/bulan dengan R/C 1,04. Jika diperhatikan dari segi komponen biaya transaksi dalam usaha penjualan pupuk bersubsidi, terlihat bahwa biaya terbesar yang harus ditanggung oleh pedagang adalah biaya pelaksanaan dalam proses penjualan dan distribusi pupuk bersubsidi, serta biaya koordinasi. Berdasarkan perbandingan rasio biaya transaksi terhadap penerimaan dan total biaya dalam usaha pupuk bersubsidi, dapat disimpulkan bahwa dampak dari biaya transaksi yang ada belum memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi pedagang pengecer pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan kinerja dan pengaktifan kembali KP3, serta mengoptimalkan peran produsen, distributor, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, sehingga dalam hal ini bisa meminimalkan terjadinya biaya transaksi. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya suatu kelembagaan yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar pedagang pengecer pupuk bersubsidi, sehingga mereka dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui organisasi tersebut, setiap anggota mendapat akses terhadap informasi terkini mengenai perkembangan pasar dan kebijakan pemerintah terkait dengan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pupuk bersubsidi yang tersedia di pasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Selain itu, saran bagi penelitian selanjutnya adalah disarankan untuk mengidentifikasi sumber-sumber data yang lebih banyak dan relevan untuk menjamin kecukupan responden dalam penelitian berikutnya. Dengan memperbanyak jumlah responden, hasil penelitian akan memiliki validitas yang lebih kuat dan dapat memberikan generalisasi yang lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Orang tua, Kepala Program Studi Agribisnis Universitas Padjadjaran, Dosen Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan, serta Pihak Pedagang Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah Jatinangor yang telah bersedia melakukan kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Boult, C., & Chancellor, W. (2020). *Productivity of Australian Broadacre and Dairy Industries, 2018–19*. <https://doi.org/10.25814/5E4A0DF015F70>
- Foeh, M. S., Nubatonis, A., Mambur, Y. P. V., & Sipayung, B. P. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi di Perbatasan Indonesia-rdtl (Studi Kasus Desa Ponu). *Jurnal Ilmiah Agribios*, 20(1), 63–78. <https://doi.org/10.36841/agribios.v20i1.1615>
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/JEP.28.2.2020.131-144>

- Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>
- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), Article 19.
- Jamil, A. (2022). Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), Article 2.
- Karundeng, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.53682/administro.v4i2.5707>
- Kautsar, M. R., Sofyan, S., & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), Article 1.
- Lestari, F., Partha, M., & Piar, C. (2022). Analisis Saluran Distribusi Pupuk Subsidi pada Koperasi Unit Desa Merta Sari di Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Nunukan Tahun 2019. *Educational Studies: Conference Series*, 2, 174–178. <https://doi.org/10.30872/escs.v2i1.1210>
- Saputra, D., Rifki, M., & Ramadhan, F. (2024). *Evaluasi Distribusi Pupuk Subsidi: Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian*.
- Sari, D. K., Yuswadi, H., & Murdyastuti, A. (2022). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8328>
- Soekartawi, A. (2002). *Analisis Usahatani*. UI-Press. <https://lib.ui.ac.id>
- Sultan, H., & Rachmina, D. (2016). Pengaruh Biaya Transaksi Terhadap Keuntungan Usahatani Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.29244/fagb.6.2.161-178>
- Tjahjono, H. K., & Ardi, H. (2008). Kajian Niat Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Menjadi Wirausaha. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2133>